

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2011–2016)

Oleh: Purwasih

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I No 117 Sonosewu, Yogyakarta

Email: [puri.nelsindo@gmail.com](mailto:puri.nelsindo@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The purpose of this study is to know: (1) the effect of local revenue (PAD) on the government's financial performance of the district/city in Special Region of Yogyakarta province, (2) the effect of fund balance on the government's financial performance of the district/city in Special Region of Yogyakarta province and (3) the effect of capital expenditures on the government's financial performance of the district/city in Special Region of Yogyakarta province. The study is using budget realization report of district/city in Special Region of Yogyakarta province on 2011-2016 published by the Central Statistical office (BPS) website of the district/city. The government's financial performance is measured by degree of fiscal decentralization ratio. The sample used is 30 data. To test the effect of local revenue, fund balance and capital expenditure on government's financial performance is using multiple linear regression analysis. The result of this study shows that: (1) the local revenue (PAD) has a positive significant effect, (2) fund balance has a negative significant effect and (3) capital expenditures has no positive significant effect on government's financial performance of the district/city in Special Region of Yogyakarta province.*

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), (2) pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan (3) pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menggunakan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011-2016 yang dipublikasikan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota. Kinerja keuangan pemerintah diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sampel yang digunakan yaitu 30 data. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, (2) dana perimbangan berpengaruh negatif dan (3) belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara legal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah

masing-masing (Fransiskus Randa dan Santo Paledung, 2013).

Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Abdul Halim, 2007:229). Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diharapkan mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah.

pemerintah pusat. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama dari pendapatan asli daerah. Pungutan yang bersifat retribusi dalam jangka pendek lebih relevan dibandingkan pajak. Hal tersebut karena pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002:107). Belanja Modal ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri dan berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Priyo Hari Adi, 2007; Fajar Nugroho dan Abdul Rohman, 2012).

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perguruan tinggi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau literatur dalam perkuliahan.
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan seperti dalam evaluasi APBD.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi.

### **Kajian Teori**

Menurut Mardiasmo (2002:46) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya dan memberdayakan, menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

- a. Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah suatu daerah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM)

dari daerah tersebut. Jika indeks pembangunan manusia tinggi berarti bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan apabila nilai indeks pembangunan masyarakat rendah berarti bahwa kesejahteraan masyarakat semakin rendah (Ni Made Inna Dariwardani dan Siti Noor Amani, 2010).

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Indra Bastian (2006:329) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo (2002:121) dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama belum dimiliki dan dikuasai negara. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan (Abdul Halim, 2007:24).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh terhadap kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Ebit Julitawati dkk., 2012).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 dalam Raka Wijayanto (2017) dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- a. Dana Alokasi Khusus

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada

Kelompok Belanja Administrasi Umum (Abdul Halim, 2007:27).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal adalah penambahan aset tetap dengan cara melakukan perbelanjaan/pengeluaran yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi termasuk biaya pemeliharaan yang memiliki fungsi menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Raka Wijayanto, 2017).

Abdul Halim (2007:231) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari beberapa jenis yaitu:

#### **Perumusan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Ebit Juliawati dkk., 2012).

Penelitian yang dilakukan Krisna Dwipayana Hamara (2010) dan Indah Puspa Sari (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 1 dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan bulan Juli 2017 sampai bulan Oktober 2017. Tempat penelitian dilakukan pada lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode tahun 2011 – 2016.

### **B. Metode Penentuan Subyek**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:80). Populasi adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Sugiyono (2011:81) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*, yang artinya setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal tahun 2011 – 2016.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik pengujian data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16. Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel – variabel dalam penelitian (Imam Ghazali, 2011:19). Hasil uji statistik deskriptif menggambarkan gambaran Kabupaten/kota, distribusi frekuensi, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

#### **2. Uji Asumsi Klasik**

##### **a. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2011:160). Model regresi yang bagus, memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat diketahui dengan melihat *normal probability plot* membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data yang berdistribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Imam Ghozali, 2011:139). Dasar analisis yang digunakan untuk menentukan heterokedastisitas yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik- titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolineaitas digunakan untuk menunjukkan adanya dalam suatu model regresi ditemukan adanya

Keterangan :

- $\alpha$  = Nilai konstanta
- y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

korelasi antar variabel bebas (Imam Ghozali, 2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi. Multikolineaitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Pada pengujian ini regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang nilai *tolerance* diatas 0,10 dan VIF dibawah 10.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2011:110) autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode (t-1). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Gejala autokorelasi ini dapat didekteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Kriteria pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Singgih Santoso, 2010:215):

- 2) Bila DW terletak di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif
- 3) Bila DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 4) Bila DW terletak di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Liner Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh bebrapa variabel bebasterhadap satu variabel terikat dengan bantuan software SPSS versi 16. Model regresi yang akan diuji sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah
- $X_2$  = Dana perimbangan
- $\varepsilon$  = Error

b. Uji F (Uji Signifikansi secara Simultan)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah. Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila angka probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.
- 2) Apabila angka probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

c. Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji (Imam Ghozali, 2011:88). Pengujian dengan uji t ini dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila angka probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.
- 2) Apabila angka probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

d. Uji Koefisien Determinasi  $R^2$  /Adjusted  $R^2$

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen, besarnya nilai koefisien determinasi adalah  $0 < R^2 < 1$ , nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Bila nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011:97).

### Hasil Analisis Data

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari jumlah sampel ( $n$ ), maximum, minimum, mean dan standard deviation.

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	53752	717151	285485,53	187122,701
Dana Perimbangan	30	500614	1384675	859845,00	226065,746
Belanja Modal	30	59151	426783	197571,83	87665,979
Kinerja Keuangan	30	0,056	0,356	0,18747	0,089924

Sumber data sekunder diolah 2017

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa deskriptif nilai minimum Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 53752, dana perimbangan sebesar 500614, belanja modal sebesar 59151 dan kinerja keuangan 0,056. Deskriptif nilai maksimum Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 717151, dana perimbangan sebesar 1384675, belanja modal 426783 dan kinerja keuangan 0,356. Deskriptif nilai rata – rata Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 285485,53, dana perimbangan sebesar 859845,00, belanja modal 197571,83 dan kinerja keuangan 0,18747. Deskriptif nilai standar deviasi

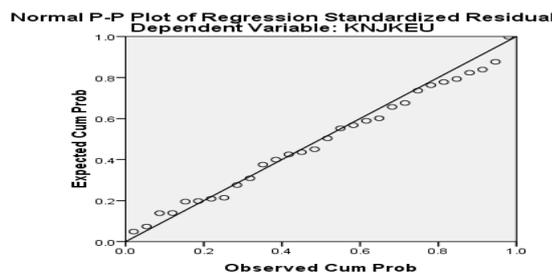
pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 187122,701, dana perimbangan sebesar 226065,746, belanja modal sebesar 87665,979 dan kinerja keuangan sebesar 0,089924.

**Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dalam variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki distribusi data yang normal atau tidak normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik *P-P plot* yang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2**  
**Uji Normalitas Data**



Sumber  
Data sekunder diolah 2017

Berdasarkan gambar 2 grafik *P-P plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolonieritas adalah apabila nilai *tolerance* diatas 0,10 dan VIF dibawah 10.

**Tabel 2**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD (X <sub>1</sub> )	0,507	1,972
Dana Perimbangan (X <sub>2</sub> )	0,477	2,096
Belanja Modal (X <sub>3</sub> )	0,315	3,170

Sumber data sekunder diolah 2017

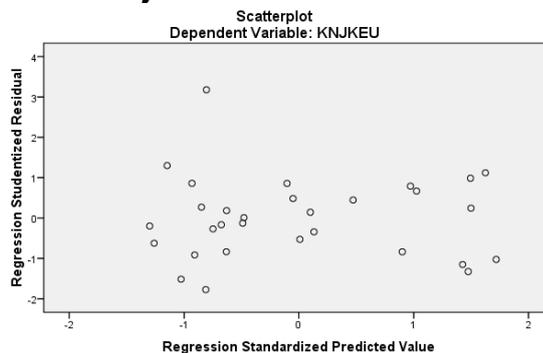
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel pendapatan asli daerah (PAD) 1,972, dana perimbangan 2,096 dan belanja modal 3,170, yaitu dibawah 10. Nilai *tolerance* variabel pendapatan asli daerah (PAD) 0,507, dana perimbangan 0,477 dan belanja modal 0,315 yaitu di atas 0,10. Hal tersebut berarti model regresi yang terbentuk tidak terdapat gejala

multikolinearitas antar variabel independen.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot pada gambar berikut:

**Gambar 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber data sekunder diolah 2017

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu dan titik-titik tersebar dibawah dan di atas angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Uji autokorelasi dalam model regresi dilakukan apabila data yang digunakan merupakan data *time series* atau runtut waktu. Hal tersebut karena hasil observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh hasil observasi sebelumnya (Imam Ghozali, 2011:110). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terjadi

**Tabel 3**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,947	0,897	0,885	0,030453	1,592

Sumber data sekunder diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 di atas nilai Durbin Watson sebesar 1,592 yaitu berada diantara -2 sampai + 2 maka dapat dinyatakan variabel tersebut tidak terdapat autokorelasi.

**3. Uji hipotesis**

**a. Analisis Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh fungsional antara

variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana perimbangan ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $X_3$ ) terhadap kinerja keuangan ( $y$ ). Uji regresi linier berganda dilakukan dengan

bantuan *software SPSS for windows versi 16*. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Ket
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,173	0,023		0,000	
PAD ( $X_1$ )	5,556E-7	0,000	1,156	0,000	Signifikan
Dana Perimbangan ( $X_2$ )	-1,218E-7	0,000	-0,306	0,002	Signifikan
Belanja Modal ( $X_3$ )	-2,019E-7	0,000	-0,197	0,091	Tidak signifikan

Sumber data sekunder diolah 2017

Berdasarkan tabel 4 diperoleh persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$y = 0,173 + 0,0000005556X_1 - 0,0000001218X_2 - 0,0000002019X_3 + \epsilon$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) dari hasil uji regresi linier berganda sebesar 0,173 yang berarti jika variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana perimbangan ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $X_3$ ) bernilai 0 (nol) maka kinerja keuangan ( $y$ ) nilainya sebesar 0,173.
- 2) Variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,0000005556 berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,0000005556 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

- 3) Variabel dana perimbangan ( $X_2$ ) sebesar -0,0000001218 berarti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,0000001218 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Variabel belanja modal ( $X_3$ ) sebesar -0,0000002019 berarti bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,0000002019 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kinerja

keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien positif sebesar 0,0000005556. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H1) diterima karena didukung data. Semakin tingginya pendapatan asli daerah suatu daerah berarti semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah yang dicapai.

- 2) Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -0,0000001218. Hal ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) diterima karena didukung data. Dalam hal ini semakin tingginya dana perimbangan yang diperoleh pemerintah

daerah menunjukkan ketidakmandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

- 3) Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,091 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -0,0000002019. Hal ini berarti bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) ditolak karena tidak didukung data. Dalam hal ini semakin tinggi belanja modal pemerintah daerah menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik.

#### b. Uji F (Uji Signifikansi secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0.05 ( $\alpha=5\%$ ). Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Signifikan
1. Regression	0,210	3	0,070	75,622	0,000
Residual Total	0,024	26	0,001		
	0,235	29			

Sumber: Data primer yang diolah 2017

Berdasarkan hasil uji F tabel 6 diperoleh nilai F 75,622 dengan tingkat probabilitas

0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan

bahwa pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), dana perimbangan ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $X_3$ ) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ). Hal ini berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah di DIY.

**c. Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)**

Hasil uji t menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual

dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dengan uji t ini dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5% pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila angka probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak.
- 2) Apabila angka probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima.

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Sig
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ )	0,000
Dana perimbangan( $X_2$ )	0,002
Belanja modal ( $X_3$ )	0,091

Sumber data sekunder yang diolah 2017

Berdasarkan hasil uji t tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,000 dan dana perimbangan ( $X_2$ ) sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan dana perimbangan ( $X_2$ ) menunjukkan hubungan yang signifikan dengan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ). Sedangkan nilai signifikansi variabel belanja modal ( $X_3$ ) sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05 yang artinya belanja modal ( $X_3$ ) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ).

**d. Uji Determinasi / Adjusted  $R^2$**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R < 1$ ). Semakin besar koefisien determinasinya maka semakin besar variasi variabel independennya mempengaruhi variabel dependennya. Penggunaan Adjusted  $R^2$  pada saat melakukan evaluasi model regresi dilakukan karena adjusted  $R^2$  dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Hasil uji Determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Uji Koefisien determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.947	0,897	0,885	0,030453

Sumber data sekunder diolah 2017

Berdasarkan tabel 7 di atas diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,885. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi DIY 88,5% dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal, sedangkan sisanya 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ) lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5% ( $0,000 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,0000005556 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah bersifat positif dan berbanding lurus. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah akan diikuti dengan semakin tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berhak diakui pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspa Sari (2016) dan Krisna Dwipayana Hamara (2010) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan

pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemadirian dalam membiayai pengeluaran daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusnadi Yudha Wiguna (2015) pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di D.I. Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ) lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5% ( $0,002 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,0000001218 yang menunjukkan bahwa hubungan antara dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah bersifat negatif dan berbanding terbalik. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati dkk. (2012) dan Indah Puspa Sari (2016) di mana dana perimbangan mempunyai pengaruh signifikan

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Dana perimbangan merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana perimbangan yang semakin besar akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal tersebut akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

### **3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah belanja modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi belanja modal ( $X_3$ ) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ) lebih besar dari nilai taraf signifikan 5% ( $0,091 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari hipotesis kedua adalah dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di D.I. Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dana perimbangan ( $X_2$ ) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ) lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5% ( $0,002 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar  $-0,0000002019$  yang menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah bersifat negatif dan berbanding terbalik. Hal tersebut berarti bahwa harapan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan mengalokasikan pada belanja modal tidak terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raka Wijayanto (2017) dan Kusnadi Yudha Wiguna (2015) di mana belanja modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap /inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Dinna Tri Yulihantini, 2017). Semakin besar porsi belanja modal pemerintah daerah terhadap belanja daerah dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

Salah satu faktor yang menyebabkan komponen belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah banyaknya korupsi yang dilakukan. Besarnya dana untuk meningkatkan pembangunan daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi tersebut akan merugikan pemerintah dan menyebabkan menurunnya Kinerja pemerintah dimata masyarakat (Fajar Nugroho dan Abdul Rohman, 2012).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY, dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien positif sebesar  $0,0000005556$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY, dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$  dan nilai koefisien negatif sebesar  $-0,0000001218$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY, dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,091 > 0,05$  dan nilai koefisien negatif sebesar  $-0,0000002019$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dinna Tri Yulihantini. 2017. *Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja*

*Keuangan Desa di Kabupaten Jember*. Tesis. Program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

- Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164.
- Ermitha Savitry. 2013. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2007-2011 di Kota Makasar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makasar.
- Fajar Nugroho dan Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 1 No. 2.
- Fransiskus Randa dan Santo Paledung. 2013. *Memahami Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Fenomenologi pada Kabupaten Poso)*. Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi UAJ Makassar. Vol. 11 No. 1.
- Hanif Nur Cholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Indah Puspa Sari. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)*. Jurnal JOM Fekon. Vol.3 No.1.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*

- SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Krisna Dwipayana Hamara. 2010. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Vol. 1 No. 12.
- Kusnadi Yudha Wiguna. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Unmura. Vol. 4 No. 2.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi Pertama. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Ni Made Inna Dariwardani dan Siti Noor Amani. 2010. *Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Negara STIA LAN. Vol.1 No. 1.
- Nurlan Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: Indeks.
- Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding SNA IX Padang.
- Raka Wijayanto. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Salman Alfarisi H. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Singgih Santoso. 2010. *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.